

11. Penandaan Pengendalian Inflasi Provinsi

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI	STRATEGI
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
1	03	02	1.01	0005	Pembangunan Bendungan	K2
1	03	02	1.01	0048	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	K2
1	03	02	1.01	0051	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	K2
1	03	02	1.01	0069	Operasi dan Pemeliharaan Penampung Air Alami Lainnya	K2
1	03	02	1.01	0070	Revitalisasi Penampung Air Alami Lainnya	K2
1	03	02	1.01	0071	Rehabilitasi Bendungan	K2
1	03	02	1.01	0078	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	K2
1	03	02	1.01	0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	K2
1	03	02	1.01	0120	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	K2
1	03	02	1.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	K2
1	03	02	1.02	0003	Pembangunan Bendung Irigasi	K2
1	03	02	1.02	0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	K2
1	03	02	1.02	0005	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak	K2
1	03	02	1.02	0007	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	K2
1	03	02	1.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	K2
1	03	02	1.02	0009	Peningkatan Bendung Irigasi	K2
1	03	02	1.02	0010	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	K2
1	03	02	1.02	0011	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak	K2
1	03	02	1.02	0013	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah	K2
1	03	02	1.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	K2
1	03	02	1.02	0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	K2
1	03	02	1.02	0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	K2
1	03	02	1.02	0017	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	K2
1	03	02	1.02	0019	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	K2
1	03	02	1.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	K2
1	03	02	1.02	0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	K2
1	03	02	1.02	0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	K2
1	03	02	1.02	0024	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak	K2
1	03	02	1.02	0026	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	K2
1	03	02	1.02	0031	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	K2
1	03	02	1.02	0033	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	K2
1	03	02	1.02	0035	Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	K2
1	03	02	1.02	0036	Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	K2
1	03	02	1.02	0037	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi	K2
1	03	10	1.01	0025	Rehabilitasi Jembatan	K3
1	03	10	1.01	0027	Pemeliharaan Berkala Jembatan	K3
1	03	10	1.01	0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	K3
1	03	10	1.01	0029	Pelebaran Jembatan	K3
1	03	10	1.01	0030	Rehabilitasi Jalan	K3
1	03	10	1.01	0031	Rekonstruksi Jalan	K3
1	03	10	1.01	0032	Pembangunan Jembatan	K3
1	03	10	1.01	0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	K3
1	03	10	1.01	0034	Pembangunan Terowongan/Tunnel	K3
1	03	10	1.01	0035	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	K3
1	03	10	1.01	0036	Penggantian Jembatan	K3

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI	STRATEGI
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
1	03	10	1.01	0037	Pembangunan Underpass	K3
1	03	10	1.01	0038	Pemeliharaan Berkala Jalan	K3
1	03	10	1.01	0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar	K3
1	03	10	1.01	0042	Pembangunan Jalan	K3
1	06	05	3.03	0001	Fasilitasi Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	K1
2	07	05	1.03	0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	K1
2	09	02	1.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	K2
2	09	02	1.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	K4
2	09	02	1.01	0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	K3
2	09	03	1.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	K2
2	09	03	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	K4
2	09	03	1.01	0007	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	K2
2	09	03	1.01	0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	K4
2	09	03	1.01	0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	K1
2	09	03	1.01	0010	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	K4
2	09	03	1.01	0011	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	K3
2	09	03	1.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	K4
2	09	03	1.01	0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	K4
2	09	03	1.02	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	K4
2	09	03	1.02	0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	K2
2	09	03	1.02	0005	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	K2
2	09	03	1.02	0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	K1
2	09	03	1.02	0007	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	K2
2	09	03	1.02	0008	Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	K4
2	09	03	1.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	K1
2	09	03	1.04	0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	K4
2	09	03	3.01	0007	Penetapan kebijakan, program, dan pembiayaan untuk pengembangan sektor pangan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan dengan berbasis pada sumber daya pertanian lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi	K2

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI	STRATEGI
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
2	09	03	4.01	0007	Penetapan kebijakan, program, dan pembiayaan untuk pengembangan sektor pangan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan dengan berbasis pada sumber daya pertanian lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi	K2
2	09	03	3.02	0005	Penetapan Kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah provinsi melalui Peraturan Daerah Provinsi	K2
2	09	03	4.02	0005	Penetapan Kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah provinsi melalui Peraturan Daerah Provinsi	K2
2	09	03	1.02	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Provinsi)	K2
2	09	03	3.02	0006	Penyusunan kebijakan, program, dan pembiayaan untuk pengembangan sektor pangan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan dengan berbasis pada sumber daya pertanian lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi	K2
2	09	03	4.02	0006	Penyusunan kebijakan, program, dan pembiayaan untuk pengembangan sektor pangan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan dengan berbasis pada sumber daya pertanian lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi	K2
2	09	03	3.03	0002	Penetapan kebijakan mengenai penentuan harga pangan lokal minimum daerah diatur dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur	K1
2	09	03	4.03	0002	Penetapan kebijakan mengenai penentuan harga pangan lokal minimum daerah diatur dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur	K1
2	09	03	1.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal	K1
2	09	04	1.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	K2
2	11	03	1.01	0005	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	K2
2	15	02	1.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	K3
2	15	02	1.05	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	K3
2	15	02	1.08	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	K3
2	15	02	1.10	0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	K4
2	15	02	1.10	0005	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	K3
2	15	02	1.11	0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	K4
2	15	02	1.15	0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	K1

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI	STRATEGI
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
2	15	02	1.15	0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	K4
2	15	02	1.15	0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	K1
2	15	03	1.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	K4
2	15	03	1.07	0001	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	K1
2	15	03	1.07	0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	K4
2	15	03	1.07	0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	K1
2	15	03	1.09	0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	K3
2	15	03	1.10	0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	K3
2	15	04	3.01	0006	Pengelolaan Bandara	K3
2	15	04	4.01	0006	Pengelolaan Bandara	K3
2	15	04	3.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara	K3
2	15	04	4.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara	K3
2	15	04	3.03	0002	Pembangunan Bandar Udara	K3
2	15	04	4.02	0002	Pembangunan Bandar Udara	K3
2	15	04	3.06	0001	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Besaran Tarif Jasa Kebandarudaraan untuk bandar udara yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara Pemerintah Daerah	K4
2	15	04	4.06	0001	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Besaran Tarif Jasa Kebandarudaraan untuk bandar udara yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara Pemerintah Daerah	K4
2	15	05	1.03	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	K3
2	15	05	1.06	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	K3
2	15	04	3.08	0001	Penyediaan Infrastruktur Perkeretaapian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi	K3
2	15	05	4.09	0001	Penyediaan Infrastruktur Perkeretaapian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi	K3
2	16	03	3.01	0013	Pembinaan dan fasilitasi start-up digital di wilayah provinsi	K3
2	16	03	4.01	0013	Pembinaan dan fasilitasi start-up digital di wilayah provinsi	K3

URUSAN / UNSUR	KODE	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI	STRATEGI
2	16	03	3.01	0014	Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital (Mencakup sektor prioritas dan UMKM)	K2
2	16	03	4.01	0014	Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital (Mencakup sektor prioritas dan UMKM)	K2
2	22	08	5.08	0007	Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	K2
3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	K4
3	25	03	1.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	K2
3	25	03	1.01	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	K2
3	25	03	1.02	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	K4
3	25	03	1.06	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	K3
3	25	03	1.02	0004	Penyediaan sarana usaha perikanan tangkap	K2
3	25	03	3.11	0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan	K4
3	25	03	4.11	0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan	K4
3	25	03	3.12	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	K2
3	25	03	4.12	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	K2
3	25	03	3.12	0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	K4
3	25	03	4.12	0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	K4
3	25	03	3.16	0001	Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dan di perairan daratan	K2
3	25	03	4.16	0001	Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dan di perairan daratan	K2

URUSAN / UNSUR	KODE				NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI	STRATEGI
	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
3	25	04	1.05	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	K4
3	25	04	1.05	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	K2
3	25	04	1.05	0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	K2
3	25	04	1.05	0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	K2
3	25	04	1.05	0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	K2
3	25	04	1.06	0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	K2
3	25	04	1.06	0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	K2
3	25	05	1.02	0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	K2
3	25	06	1.01	0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	K4
3	25	06	1.03	0002	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	K2
3	25	06	1.03	0003	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	K3
3	25	06	3.04	0001	Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri	K2
3	25	06	4.04	0001	Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri	K2
3	25	06	3.06	0001	Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan besar	K3
3	25	06	4.06	0001	Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan besar	K3
3	25	06	3.07	0001	Fasilitasi Penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha menengah dan besar	K2
3	25	06	4.07	0001	Fasilitasi Penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha menengah dan besar	K2
3	25	06	3.09	0001	Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentrapengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan besar	K2

URUSAN / UNSUR	KODE	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI	STRATEGI
3	25	06	4.09	0001	Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentrapengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan besar	K2
3	27	02	1.01	0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	K2
3	27	02	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	K2
3	27	02	1.01	0003	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	K2
3	27	02	1.01	0004	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	K2
3	27	02	1.01	0006	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	K2
3	27	02	1.01	0007	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	K2
3	27	02	1.02	0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	K2
3	27	02	1.02	0006	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	K2
3	27	02	1.02	0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	K2
3	27	02	1.02	0008	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	K2
3	27	02	1.02	0009	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek	K2
3	27	02	1.02	0010	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	K2
3	27	02	1.02	0011	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	K2
3	27	02	1.02	0012	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	K2
3	27	02	1.02	0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	K2
3	27	02	1.02	0014	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	K2
3	27	02	1.04	0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	K2
3	27	02	1.04	0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	K2
3	27	02	1.05	0003	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	K2
3	27	02	1.05	0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	K2
3	27	02	1.05	0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	K2
3	27	02	1.07	0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	K2
3	27	02	1.07	0003	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	K2
3	27	02	1.07	0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	K2
3	27	03	1.01	0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	K2
3	27	03	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	K2
3	27	03	1.01	0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	K2

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	KODE			NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI	STRATEGI
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
3	27	03	1.01	0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	K2
3	27	03	1.01	0015	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di tingkat provinsi	K2
3	27	03	1.01	0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	K2
3	27	03	1.01	0017	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	K2
3	27	03	1.02	0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	K2
3	27	03	1.02	0002	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	K2
3	27	04	1.03	0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	K2
3	27	05	1.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	K2
3	27	05	1.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	K2
3	27	05	1.01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	K2
3	27	05	1.01	0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	K2
3	27	07	1.01	0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	K2
3	27	07	1.01	0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	K2
3	27	07	1.02	0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	K2
3	27	07	1.02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	K2
3	27	07	1.03	0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	K2
3	27	07	1.03	0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	K2
3	27	07	3.02	0003	Pengelolaan UPTD Penyuluhan Pertanian di Tingkat Provinsi	K2
3	27	07	4.02	0003	Pengelolaan UPTD Penyuluhan Pertanian di Tingkat Provinsi	K2
3	28	03	1.09	0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	K2
3	28	03	1.09	0006	Pembangunan Sumber Benih	K2
3	29	04	3.11	0001	Pengawasan Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Papua	K2
3	29	04	3.12	0002	Distribusi BBM Pada SPBU, A PMS, dan Sejenisnya di Provinsi Papua	K2
3	29	04	4.11	0001	Pengusulan Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Papua Barat	K2
3	29	04	4.12	0002	Distribusi BBM Pada SPBU, A PMS, dan Sejenisnya di Provinsi Papua Barat	K2
3	29	05	3.08	0003	Kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT	K2
3	29	05	4.08	0003	Kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT	K2

KODE					NOMENKLATUR SUB KEGIATAN PROVINSI	STRATEGI
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
3	29	05	1.03	0003	Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	K2
3	29	05	1.06	0005	Pemberian insentif/disinsentif pemanfaatan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading , dst)	K2
3	29	05	1.07	0010	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah	K4
3	30	03	1.01	0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	K3
3	30	03	1.01	0003	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	K3
3	30	03	1.01	0004	Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka implementasi SRG di masing- masing kabupaten/kota dalam provinsi	K3
3	30	04	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	K4
3	30	04	1.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	K4
3	30	04	1.02	0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	K1
3	30	04	1.03	0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	K2
3	30	04	1.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	K2
3	30	03	3.01	0004	Pemberian bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi	K3
3	30	03	4.01	0004	Pemberian bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi	K3
3	30	04	3.01	0005	Penguatan dan Pengawasan Perdagangan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (bapokting), Barang Modal Penunjang Produksi OAP, serta Barang Strategis lainnya di Provinsi Papua	K3
3	30	04	4.01	0005	Penguatan dan Pengawasan Perdagangan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (bapokting), Barang Modal Penunjang Produksi OAP, serta Barang Strategis lainnya di Provinsi Papua	K3
3	31	02	3.01	0007	Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik OAP	K2
3	31	02	4.01	0007	Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik OAP	K2
4	01	03	1.03	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	K3
5	01	02	1.03	0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	K3

Ket:

K1: Keterjangkauan Harga

K2: Ketersediaan Pasokan

K3: Kelancaran Distribusi

K4: Komunikasi Efektif